

Tantangan Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Berkelanjutan PT. Kalimantan Prima Persada

Adi Sucipto^{1*}, Sadewo², dan Hanna M. Hakim³

¹ Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong; adisucipt59@gmail.com

² Alumni Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong; Sadewo.3a@gmail.com

³ Alumni Program Studi Magister Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Gadjah Mada; Hannamarthatya@gmail.com

* Correspondence

Received: 14/10/2021; Accepted: 03/12/2021; Published: 30/12/2021

Abstract: *PT Kalimantan Prima Persada (PT KPP) is a one of mining industry services in Kutai Kartanegara Regency which operates in three villages. The practice of Corporate Social Responsibility in these three villages has used to giving cash. Nowadays, PT KPP seeks to change the existing pattern into a planned program. In line with this, this study aims to obtain an overview of CSR practices and challenges in order to optimize the use of PT KPP's CSR funds. The method used in this research is descriptive with a qualitative approach. Based on the conditions, three main problems were found. First, lack of controlling from PT KPP in planning process. Second, low capacity of local human resources so CSR funds are mostly used for social and infrastructure sectors. Third, economic independence program has not become a priority. This research suggest to enhance the programs that focus on improving community skills.*

Abstrak: PT Kalimantan Prima Persada (PT KPP) merupakan salah satu jasa industri pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang beroperasi di tiga desa. Praktik Corporate Social Responsibility di ketiga desa ini sudah terbiasa dengan pemberian uang tunai. Saat ini, PT KPP berupaya mengubah pola yang ada menjadi program yang terencana. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang praktik dan tantangan CSR dalam rangka optimalisasi penggunaan dana CSR PT KPP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan kondisi tersebut, ditemukan tiga masalah utama. Pertama, kurangnya pengawasan dari PT KPP dalam proses perencanaan. Kedua, rendahnya kapasitas sumber daya manusia lokal sehingga dana CSR sebagian besar digunakan untuk sektor sosial dan infrastruktur. Ketiga, program kemandirian ekonomi belum menjadi prioritas. Penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan program yang berfokus pada peningkatan keterampilan masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pertambangan Batu Bara

1. Pendahuluan

Industri pertambangan sangat penting dalam pembangunan ekonomi global karena lebih dari 20 juta orang di dunia bergantung pada ekstraksi sumber daya mineral sebagai dasar untuk hidup mereka (Jenkins, 2004). Dibalik posisinya yang strategis bagi kemajuan perekonomian, kritik atas dampak lingkungan dan sosial yang diakibatkan industri pertambangan terus bermunculan. Meskipun terdapat pendapat bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya (Friedman, 2002), mereka juga harus memikirkan tanggungjawab dan strategi yang paling tepat sesuai dengan kondisi wilayah di mana mereka beroperasi agar kegiatan bisnisnya dapat terus berkelanjutan (Borglund, 2021). Pemerintah Pusat maupun Daerah merespons realita keberadaan industri pertambangan dengan membentuk seperangkat peraturan yang mewajibkan mereka untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), dimulai dari Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sampai Peraturan Daerah Kutai Kartanegara No.15 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Perkembangan dan kemajuan praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Kutai Kartanegara sudah seharusnya diinisiasi oleh perusahaan-perusahaan industri pertambangan. Berdasarkan data pada tahun 2017, Kabupaten Kutai Kartanegara memproduksi batu bara terbanyak di Kalimantan Timur, yaitu mencapai 65,11 juta ton (Wahyu, 2018). Sementara jika dilihat dari jumlah perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional mencatat terdapat 1.190 izin di mana 625 izin diantaranya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. (Gumay, 2019). Saat ini, industri pertambangan di Kutai Kartanegara mulai memberikan perhatian serius terhadap dampak lingkungan dan sosialnya. Sebagian besar perusahaan telah melakukan TJSP, tetapi terdapat beberapa kasus di mana kegiatan TJSP masih dianggap bagian lain di luar manajemen perusahaan, sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan (Porter & Kramer, 2011).

Salah satu perusahaan yang bergerak di jasa industri pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah PT Kalimantan Prima Persada (PT KPP), yaitu anak perusahaan PT Pama persada Nusantara (PAMA), salah satu

kontraktor pertambangan terbesar di Asia Tenggara. PT KPP berkantor di Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan dan dengan wilayah operasi di antara 2 desa lainnya yaitu Desa Loa Janan Ulu dan Desa Purwajaya. PT KPP memulai kontrak kerja operasi bersama dengan PT Surya Jalur Anugerah (PT SJA) sejak tahun 2013. Sehingga dalam melaksanakan program TJSP di ketiga desa tersebut menggunakan kontrak TJSP PT SJA. Permasalahan muncul ketika beban pengelolaan TJSP yang sebelumnya berbentuk pemberian uang tunai, PT KPP berusaha mengubahnya menjadi program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tujuan TJSP Perusahaan induknya yaitu PT PAMA.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) PT. Kalimantan Prima Persada guna mendapatkan solusi-solusi dalam penyelesaian permasalahannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dianalisis dengan cara menganalisis hasil wawancara mendalam dan hasil dokumentasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer yang merupakan hasil wawancara serta hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, serta data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti dokumen-dokumen terkait.

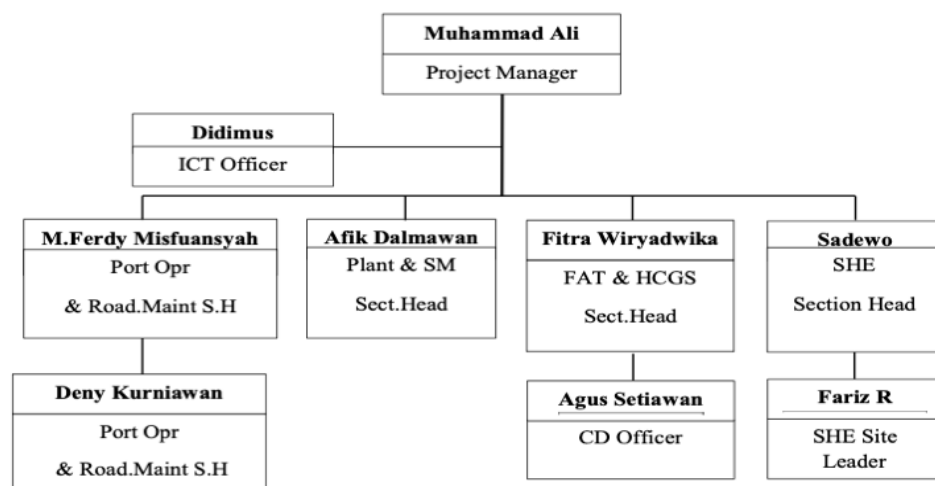
2. Hasil Penelitian

Berdasarkan konsepnya, TJSP bukan praktik pemberian uang satu atau dua kali selama perusahaan beroperasi. Namun, TJSP adalah bagian dari proses dan strategi jangka Panjang perusahaan demi keberlangsungan perusahaannya (Sitaloppi, 2020). Seperti telah dijabarkan di atas, perusahaan pertambangan batubara, berdasarkan sifat operasionalnya memerlukan pengawasan ekstra untuk masalah dampak lingkungan dan sosial bagi sekitarnya. Pembukaan lahan pertambangan memiliki dampak sosial berupa pengungsian, hilangnya mata pencaharian, pengucilan sosial, dan pemindahan pemukiman warga lokal menimbulkan risiko besar bagi keberlanjutan sosial (Kemp, 2010). Oleh karena itu, perusahaan pertambangan batubara memiliki tanggung jawab khusus terhadap perlindungan lingkungan dan pembangunan sosial. Perusahaan berskala global harus menyadari situasi risiko ini dan mendorong anak perusahaannya untuk menjadi lebih bertanggung jawab kepada masyarakat lokal (Frederiksen, 2018).

Tidak terkecuali PT KPP yang harus menyelaraskan tanggung jawab sosialnya dengan perusahaan induknya.

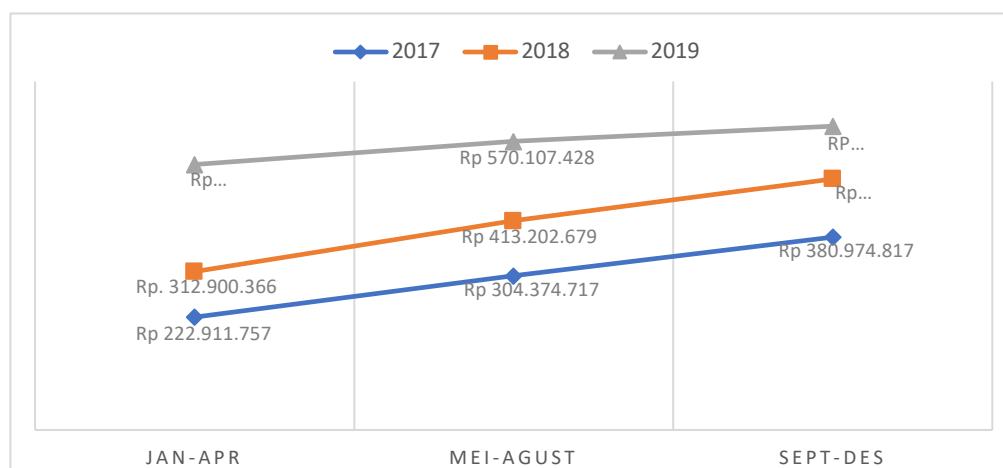
Keberhasilan TJSP pada dasarnya ditentukan oleh komitmen para petinggi dan/atau pemilik perusahaan (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & Colle, 2010). Namun, dalam jangka panjang, Kelembagaan TJSP menjadi penting di dalam organisasi. TJSP tidak bisa menjadi wahana pengeluaran uang yang tidak jelas arah penggunaannya. Sebagai bagian dari strategi perusahaan, alokasi TJSP di dalam anggaran perusahaan harus jelas. Salah satu indikator komitmen perusahaan adalah jika terdapat bagian khusus yang menangani program TJSP (Khojastehpour, 2019).

Berdasarkan Struktur organisasi PT. Kalimantan Prima Persada *Job site* SJAL seperti pada Gambar 1 terdiri atas seorang Project Manager yang membawahi empat bidang/departemen dengan dikepalai oleh seorang *Section Head* (kepala seksi) dan setiap kepala seksi akan membawahi beberapa *officer / staff*. Keempat departemen tersebut adalah : *Produksi & Haul Road Maintenance departement*, *Plant & SM Departemen*, *HCGS & FAT Departement*, dan *SHE Departement*. Terdapat 1 orang *Community Depelopmet Officer* (CDO) di bawah *HCGS & FAT Departement* yang bertanggung jawab melaksanakan program TJSP. Dari struktur organisasi ini dapat dilihat bahwa untuk tanggung jawab pelaksanaan program TJSP di PT. KPP site SJAL masih sangat kurang jika dibandingkan dengan cakupan luas wilayah yang berada di tiga desa.



Gambar 1. Struktur Organisasi PT.Kalimantan Prima Persada

Program TJSP PT KPP mencakup 3 wilayah desa yang menjadi tanggung jawabnya yaitu Desa Loa Duri Ilir, Desa Loa Janan Ulu dan Desa Purwajaya. Sejauh ini pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dipraktikkan oleh PT KPP kepada masyarakat berupa pemberian dana tunai melalui pemerintah desa. Dana tersebut nantinya wajib dipertanggungjawabkan ke perusahaan berupa laporan kegiatan selama 1 tahun. Besaran dana CSR yang diberikan perusahaan kepada masyarakat ditentukan oleh seberapa banyak produksi/ pengapalan penjualan batu bara. Hal ini didasarkan pada perjanjian perusahaan terdahulu dengan tokoh dan pemerintah desa yaitu sebesar Rp. 500 / Metric Ton. Perjanjian besaran berlaku untuk tiga desa tersebut. Sebagai gambaran, berikut besaran dana yang diberikan PT KPP kepada Desa Loa Duri Ilir:



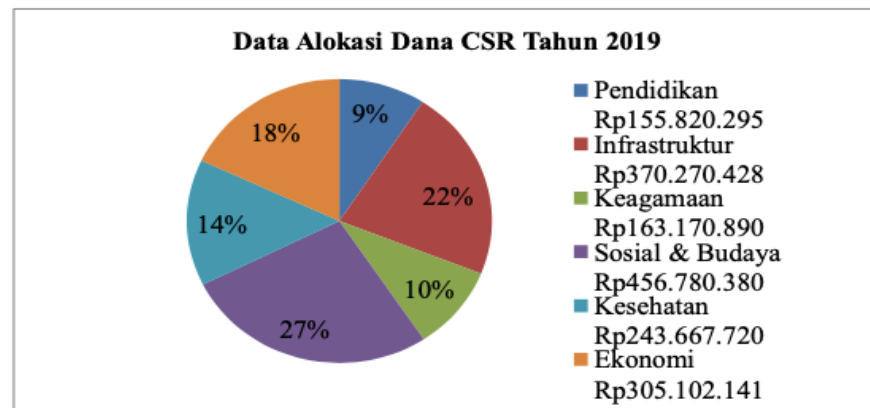
Gambar 2. Grafik Dana TJSP PT.KPP untuk Desa Loa Duri Ilir Tahun 2017-2019

Dari laporan TJSP yang disalurkan ke pihak desa sebagai perwakilan masyarakat Desa Loa Duri Ilir terlihat jumlah yang *fluktuatif*, namun menunjukkan angka yang besar dan kecenderungan naik dari tahun 2017 sampai akhir tahun 2019. Penurunan dana TJSP diakibatkan penurunan produksi dari dana sebesar Rp 1.694.811.854,00 pada tahun 2019, menjadi Rp 1.176.038.369,00 pada tahun 2020. Untuk pelaporan di tahun 2020, peneliti mendapatkan laporan penyerapan sebagian saja dari dana yang dialokasikan dikarenakan masa pandemi Covid-19 yang melanda sehingga program tahun 2020 belum terlaksana. Dana yang telah digunakan senilai Rp 119.500.000,00; dengan rincian penanganan Covid 19 sebesar Rp 114.500.000; dan dipergunakan untuk acara keagamaan sebesar Rp

5.000.000,00. sementara dana yang belum dialokasikan sebesar Rp 1.056.538.369,00.

Dana TJSP yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini belum terlihat signifikansinya di dalam mensejahterakan masyarakat. Begitu pula yang dinilai oleh pihak PT KPP yang melihat dana TJSP yang diberikan belum berdampak positif bagi citra perusahaan maupun apresiasi dari keberhasilan program oleh masyarakat setempat. Terlebih lagi, PT KPP menilai bahwa pola TJSP yang dijalankan terdahulu, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini juga banyak terjadi di perusahaan-perusahaan besar lainnya. Masyarakat pada umumnya lebih menyukai bantuan yang bersifat instan dan berbentuk materi atau barang. Perusahaan umumnya belum memiliki data tentang program-program pemerintah dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga peran pemerintah dengan membentuk suatu lembaga yang bisa menjembatani kepentingan pembangunan di daerah serta menjadi alat promosi dan komunikasi perusahaan dengan masyarakat (Soetrisno, 2020).

Dampak yang dihasilkan dari program TJSP yang dapat dirasakan manfaatnya sampai sekarang oleh masyarakat masih terbatas pada bidang sosial dan infrastruktur. Dalam bidang sosial, PT KPP memberikan bantuan truk sampah yang sampai saat ini masih berjalan. Sementara itu, dalam bidang infrastruktur salah satunya adalah pembangunan sarana-prasarana TK Al Qomar. PT KPP sebagai pemberi program TJSP memiliki peran strategis untuk mendorong program penguatan ekonomi masyarakat seperti pengembangan budidaya ikan, lebah, dan burung walet dimana di tiga desa binaan PT KPP masih sangat berpotensi untuk dikembangkan



Gambar 3. Data Alokasi Dana CSR PT. KPP Tahun 2019

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa dana TJSP PT KPP mayoritas dialokasikan untuk kegiatan sosial budaya dan infrastruktur. Alokasi Kegiatan Sosial dan Budaya sebesar 27% dari total dana atau sebesar Rp 456.780.380,00. Sementara itu, alokasi dana untuk infrastruktur sebesar 22% dari anggaran dengan jumlah Rp 370.270.428,00. Hal ini menggambarkan bahwa alokasi anggaran yang berdampak pada tingkat pendapatan dan keberlangsungan kemandirian warga masih belum menjadi prioritas pelaksanaan TJSP PT KPP. Di sisi lain, pemberian dana yang diserahkan langsung kepada masyarakat dan alokasi penganggaran ini menunjukkan masalah pada kapasitas masyarakat desa dalam membuat pengajuan, perencanaan, pengadministrasian, serta pengelolaan bantuan yang masih rendah.

Pemahaman setiap pemangku kepentingan perusahaan memengaruhi praktik etika bisnis dan praktik tanggung jawab sosialnya (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & Colle, 2010). Program yang melibatkan masyarakat merupakan program jangka panjang dimana program tersebut harus dimusyawarahkan bersama. Perusahaan akan terus menimbang apapun yang diusulkan masyarakat yang terlibat dengan tentunya melihat potensi kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam penyusunan program yang bersumber dari dana TJSP PT KPP, pemerintah desa memerlukan penguatan pendampingan dari PT KPP.

Peran aktif masyarakat juga dapat tergambar dari bagaimana proses penyusunan program dijalankan. Selama ini, proses penyusunan ini mengikuti metode pembahasan yang sama dengan pembahasan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Tahapan pertama dimulai dari musyawarah tingkat RT dilanjutkan musyawarah tingkat Dusun kemudian Musyawarah Desa dan terakhir di Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Namun ditemukan pernyataan berbeda pada salah satu responden yang berasal dari masyarakat yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pemakaian anggaran dana TJSP PT KPP hanya melibatkan orang-orang tertentu saja.

Berdasarkan proses penyusunannya, muncul pertanyaan berikutnya jika program TJSP disusun bersama dan melalui proses sedemikian panjangnya, mengapa efisiensi dan efektivitas pelaksanaan TJSP masih rendah dan perusahaan masih belum melihat hasilnya? Dalam pelaksanaan program TJSP, penentu utama dari keberhasilan program terletak pada program yang berbasis pengembangan ekonomi mandiri dan pemberdayaan masyarakat (Borglund, 2021). Pelaksanaan TJSP PT KPP belum mengarah pada kedua hal ini. Seperti halnya perusahaan industri pertambangan di belahan dunia lainnya, dampak hilangnya mata pencaharian masyarakat lokal sebagian besar terabaikan (Narula, 2017). Partisipasi masyarakat sebagai pemicu kemandirian dan proses pemberdayaan adalah komponen yang sangat penting. Peran TJSP PT KPP perlu untuk menyentuh pada sumber permasalahan dari dampak inti bisnis ini, jika hal ini tidak diperhatikan, program TJSP dalam bentuk program maupun dana berpotensi menimbulkan konflik baru.

Untuk mengurangi risiko ini, PT KPP perlu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan untuk menyentuh pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Diantaranya yaitu menyediakan infrastruktur dan layanan kesehatan dan pendidikan dasar, peluang ekonomi dalam bentuk kompensasi dan royalti, pekerjaan langsung atau tidak langsung (seperti usaha kecil *laundry*, *katering*, dan sebagainya), peningkatan kapasitas dan program pengembangan masyarakat lainnya kepada mereka yang terkena dampak (Narula, 2017). Proses pembangunan tersebut dilakukan secara simultan sehingga semakin banyak keterampilan, atau semakin tingginya kompetensi yang dimiliki masyarakat maka semakin tinggi kemampuannya berpartisipasi. Dengan kata lain, respons dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program TJSP cukup tinggi dan dana TJSP yang dikeluarkan perusahaan mencapai titik paling efisien.

3. Kesimpulan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dipraktikkan oleh PT Kalimantan Prima Persada kepada masyarakat selama ini berupa penyaluran dana tunai melalui pemerintah desa di Desa Loa Janan Ulu, Loa Duri Ilir, dan Desa Purwajaya. Output dana tersebut wajib dipertanggungjawabkan ke perusahaan berupa laporan kegiatan selama 1 tahun. Komitmen PT KPP untuk merubah pola pemberian bantuan tunai menjadi program pemberdayaan masyarakat membutuhkan partisipasi dari seluruh pihak pemangku kepentingan. Berdasarkan kondisi di lapangan, ditemukan masalah yang menyebabkan dana TJSP yang telah diberikan kepada masyarakat tidak berdampak sesuai harapan. Dari tahapan penyusunan rencana pemakaian anggaran dana TJSP PT KPP, terlihat proses yang kurang optimal karena proses ini hanya melibatkan orang-orang tertentu saja. Akhirnya berdampak pada penggunaan dana TJSP yang sebagian besar digunakan untuk bidang sosial dan infrastruktur, sementara program yang berfokus pada peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat belum menjadi prioritas. Berdasarkan analisis di atas, salah satu upaya agar pemanfaatan dana TJSP PT KPP dapat memiliki signifikansi bagi masyarakat lokal adalah dengan pendampingan PT KPP dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia masyarakat lokal dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengalokasian anggaran TJSP. Sehingga, diharapkan masyarakat lebih peka dan memahami bahwa pembangunan harus bersumber pada manusianya, bukan hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur saja.

Referensi

- Borglund, T. D. (2021). *CSR and sustainable business*. Germany: Sanoma Utbildning.
- Disemadi, H. S., & Paramita, P. (2020). Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika* , 1-16.
- Frederiksen, T. (2018). Corporate social responsibility, risk and development in the mining industry. *Resources Policy Ed 59*, 495-505.

- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & Colle, S. d. (2010). *Stakeholder Theory: The State of the Art*. New York: Cambridge University Press.
- Friedman, M. (2002). *Capitalism and Freedom*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Gumay, A. (2019, September 2). *Ekonomi*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190902095809-92-426714/perusahaan-raksasa-batu-bara-di-bumi-kaltim-ibu-kota-baru>
- ISO. (2010). *ISO 26000: Guidance on social responsibility*. Geneva: ISO.
- Jenkins, H. (2004). Corporate social responsibility and the mining industry: Conflicts and constructs. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 11(1), 23-34.
- Kemp, D. (2010). Community relations in the global mining industry: Exploring the internal dimensions of externally orientated work. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 17 (1), 1-14.
- Khojastehpour, M. &. (2019). The effect of CSR commitment on firms' level of internationalization. *Social Responsibility Journal*, .
- Kirana, A. D. (2021). Analyzing Board Characteristics, Ownership Structure and Company Characteristic to CSR Disclosure. *Accounting Analysis Journal*, 10(1), 62-70.
- Lesmana, D. &. (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pembangunan di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Kecamatan Teluk Pandan Dan Bengalon). *Jurnal Riset Pembangunan* 3 (2), 78-87.
- Majer, M. (2013). The practice of mining companies in building relationships with local communities in the context of CSR formula. *Journal of Sustainable Mining*, 12(3), 38-47.
- Murashima, M. (2020). CSR Activity, Visibility, and Firm Value in the Long Term: Evidence from Japan. *Asia-Pacific Social Science Review* (20), No.4.
- Narula, S. A. (2017). A sustainable livelihood framework to implement CSR project in coal mining sector. *Journal of Sustainable Mining*, 16(3), 83-93.

Porter, M., & Kramer, M. (2011). Creating Shared Value. *Harvard Business Review Vol 89*, 2-17.

Siltaloppi, J. R. (2020). Integrating CSR with business strategy: a tension management perspective. . *Journal of Business Ethics*, 1-21.

Soetrisno, A. (2020). *Pendekatan efisiensi CSR dengan pembentukan sebuah lembaga negara yang mengatur dana dan program-program CSR (Doctoral dissertation)*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan.

Wahyu, A. (2018, Februari 28). *Berita*. Diambil kembali dari Antaranews: <https://www.antaranews.com/berita/687168/kukar-produksi-6511-juta-ton-batu-bara-terbanyak-di-kaltim-pada-2017>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).